

## **ANALISIS PENGARUH BI RATE DAN KINERJA KEUANGAN BANK TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA (2010 - 2017)**

**Didit Suprayitno, Idah Zuhroh, M. Faisal Abdullah**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

\* Corresponding author: [sriinuryati@gmail.com](mailto:sriinuryati@gmail.com)

---

### **Artikel Info**

#### *Article history:*

Received 27 May 2019

Revised 29 May 2019

Accepted 22 June 2019

Available online 29 June 2019

---

**Keyword:** *Financing; BI Rate; DPK; CAR; BOPO*

JEL Classification

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of independent variables, namely the BI Rate, Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Operational Income Costs (BOPO) on Islamic bank financing in Indonesia 2010 - 2017. The analysis used in This study uses Panel Regression with three methods namely Common Effect, Fixed Effect and Random Effect. In the panel regression the right selection is done using the Chow test and the Hausman test. The results of the study show that the BI Rate variable has a significant negative effect on financing, Third Party Funds (TPF) have a significant positive relationship to financing, while the Capital Adequacy Ratio (CAR) has a significant positive effect on financing and for Operational Income Operational Costs (BOPO) no significant negative effect on financing. DPK has a significant positive effect on financing, Capital Adequacy Ratio (CAR) has a significant positive effect on financing and for Operational Income Operating Costs (BOPO) there is no significant negative effect on financing.*

---

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi islam sekarang mulai dikenal dan menjadi primadona bukan di negara-negara islam saja melainkan juga di negara barat atau negara dengan penduduk non muslim, banyak masyarakat melihat sistem islam menggunakan sistem nilai dan tatanan dianggap menjadi salah satu alasan yang menghambat jalannya pembangunan perekonomian. Sebagian besar pengikut paham liberalisem dan pragmatism sempit, memiliki penilaian tentang kegiatan ekonomi dan keuangan dapat mengalami peningkatan serta perkembangan jika di jauhkan dari nilai juga rambu-rambu dari ilahi (Annisa & Yaya, 2013).

Seiring dengan majunya perkembangan perekonomian di Negara Indonesia, akan memunculkan berbagai institusi komesil modern yang bergerak pada bidang keuangan, diantaranya adalah dengan adanya bank Syariah. Perbankan syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan dan secara praktis dikarenakan system perbankan berbasis bunga (Kurniawati, 2012). Sampai saat ini dunia perbankan islam sangat berkembang pesat yang tersebar di negara islam atau negara non-islam pertumbuhan bank Syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sector rill dikarenakan produk inti dari bank syariah yaitu sklm pembiayaan masyarakat dan mudharabah (Malik & Suliswanto, n.d.)

Pertumbuhan bank Syariah dapat dilihat melalui dana pihak ketiga (DPK). dana pihak ketiga menurut dunia perbankan syariah adalah darah

tanpa hal itu lembaga perbankan akan lesu dan tidak memiliki gairah, untuk itu dunia perbankan Syariah perlu melakukan ekspansi pembiayaan terhadap perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan eksistensi di dunia perbankan syariah. Selain itu peran dunia perbankan tidak hanya memikirkan tentang keuntungan dari sisi bank saja melainkan peran perbankan sangat penting untuk meningkatkan dan mensukseskan perekonomian di dalam Negara.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank Syariah yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan paling besar, selain itu pembiayaan merupakan indikator lain dari pertumbuhan dunia perbankan Syariah, oleh karena itu banyak pihak yang menggunakan produk yang di tawarkan oleh bank Syariah terutama pembiayaan dalam mewujudkan visi dan misi sebuah perusahaan, sebagian besar pelaku usaha di dunia riil sangat memanfaatkan produk bank Syariah dengan beberapa akad yang di tawarkan oleh bank Syariah di Indonesia. Menurut (Indriana & Zuhroh, 2012) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan disebut juga sebagai sistem profit sharing (bagi hasil) yang dimana dilakukan sistem kesepakatan atau ikatan yang dilakukan di dalam bisnis secara Bersama, di usaha tersebut disepakati pembiayaan bagi hasil atas keuntungan yang akan didapatkan kedua belah pihak yang berjanji atau lebih.

BI Rate dapat memberikan pengaruh terhadap suku bunga deposito, penyaluran pembiayaan dan suku bunga kredit pada perbankan Syariah dan konvensional, jika perekonomian dalam kondisi kelesuan maka Bank Sentral Indonesia (BI) mampu menggunakan kebijakan moneter secara ekspansif untuk menurunkan persentase suku bunga untuk dapat mendorong aktifitas perekonomian. Proses penurunan suku bunga BI Rate akan membuat suku bunga kredit turun, sehingga akan membuat dunia usaha atau masyarakat meningkatkan kredit mereka kepada bank. Selain itu menurunnya suku bunga kredit dapat membuat biaya modal perusahaan dalam melakukan investasi menurun. Hal tersebut akan memberikan peningkatan aktivitas investasi atau konsumsi sehingga membuat jalannya perekonomian akan membaik. Sebaliknya jika inflasi sedang naik maka BI akan memberi respon menggunakan cara menaikkan BI Rate untuk memperlambat aktifitas perekonomian yang sangat cepat kemungkinan akan memberikan dampak kepada pengurangan nilai inflasi.

Faktor yang paling cepat mempengaruhi nilai dari pembiayaan merupakan BI Rate, besaran nilai BI Rate akan memperlihatkan secara pragmatis dunia perbankan syariah masih sangat bergantung kepada nilai suku bunga pasar konvensional namun demikian yang terjadi di dalam prakteknya bank merupakan Lembaga intermediasi, terkadang harus mengalami kelebihan dana, kekurangan dana atau mengalami masalah likuiditas. Biasanya hal ini dikarenakan perbedaan waktu penerimanaa dan penanaman bisa juga karena (mismatch) kondisi ini dimana dana yang sudah diterima bank tidak bisa langsung digunakan dalam bentuk pembiayaan (Syahbudi, 2018).

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicai bank dalam operasionalnya (Putri & Susilowati, 2018). Salah satu kinerja keuangan adalah

Dana Pihak Ketiga (DPK), merupakan nadi bagi bank-bank di Indonesia terutama bank Syariah, sebab bank memiliki dua fungsi besar menghimpun dana dari masyarakat dengan menabung atau giro dan menyalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan, jika salah satu dari fungsi tersebut berhenti atau tidak jalan maka bank akan mengalami krisis. Maka dengan semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi juga dana pihak ketiga yang akan di himpun oleh bank Syariah. DPK adalah dana yang diperoleh bank dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Sumber dana tersebut adalah sumber dana paling penting untuk oprasional kegiatan perbankan juga menjadi tolak ukur kesuksesan apabila bank mampu membiayai oprasional bank dari sumber dana tersebut. Pencarian dana dari sumber tersebut dikategorikan paling cepat apabila dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Sumber DPK adalah sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang berada disisi aktiva neraca bank (Kasmir, 2006).

Capital Adequacy Ratio (CAR), merupakan standar kecukupan modal yang sangat penting dan wajib dipahami atau dipenuhi bank. Variabel ini menghitung rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki (Oneestasya, Zuhroh, & S, 2018). Berdasar ratio kecukupan modal jika bank ingin menaikkan jumlah pembiayaan ke masyarakat jadi secara langsung bank diwajibkan untuk meningkatkan jumlah modal bank. Nilai CAR yang tinggi diartikah bank memiliki modal yang cukup untuk menunjang oprasional atau berjaga-jaga dalam mengantisipasi resiko yang disebabkan oleh penyaluran pembiayaan.

Biaya oprasional dan pendapatan oprasional (BOPO) di dalam bank diartikan sebagai efisiensi, BOPO merupakan salah satu alat ukur kinerja yang penting guna mengukur tingkat kesehatan bank sebagai Lembaga sehat dan berkelanjutan. Semakin tidak efisien bank dalam mengelola oprasional akan membuat nilai biaya oprasional bank tinggi, sehingga akan menurunkan keuntungan bank yang pada akhirnya berdampak menurunnya tingkat pembiayaan, berdasarkan peraturan bank indonesia, rasio BOPO sebagai indikator efisiensi bank yang ideal adalah 60-70%.

(Syahbudi, 2018). Meneliti tentang “pengaruh variabel makro ekonomi terhadap pembiayaan bank Syariah di Indonesia”. Tujuan penelitian tersebut adalah menguji pengaruh suku bunga, kurs, inflasi dan PDB terhadap pembiayaan bank Syariah. Hasil penelitian tersebut adalah, Inflasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan, BI Rate memiliki pengaruh negative tidak signifikan, Kurs memiliki hibungan negatif signifikan dan untuk PDB positif mempengaruhi pembiayaan.

(Fauziah, 2016) meneliti tentang “Pengaruh DPK, CAR, Inflasi, Niali Tukar Rupiah Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Komposisi Pembiayaan Mudharabah,” Tujuan penelitian tersebut adalah menguji apakah DPK, CAR, Inflasi, Nilai tukar rupiah dan Tingkat bagi hasil memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, Hasil penelitian menyatakan bahwa DPK memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, CAR memiliki pengaruh positif signifikan, Inflasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan, Nilai tukar memiliki pengaruh positif

signifikan, Tingkat bagi hasil memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

(Arianti, dkk 2016) meneliti tentang “Pengaruh BOPO, NIM, NPL Dan CAR Terhadap Jumlah Penyalurann Kredit Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public Pada Bursa Efek Indonesia Tahin 2011-2014”. Tujuan dalam penelitian ini melihat pengaruh BOPO, NIM, NPL dan CAR terhadap penyaluran kredit kepada perusahaan perbankan yang go publik. Hasil dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa, BOPO memiliki hubungan negative signifikan, NIM memiliki hubungan positif signifikan, NPL memiliki hubungan negative signifikan dan CAR memiliki hubungan positif signifikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder adalah di Indonesia sebagai sampel. Bank yang digunakan memiliki kriteria tertentu, memiliki data publikasi awal 2010.1 – 2017.4 bank yang di gunakan adalah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dalam bentuk dokumentasi yang diterbitkan oleh bank indonesia pada situs [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), selain itu juga di ambil dari situs bank masing-masing yang mendukung penelitian ini. Pembiayaan syariah menggunakan satuan Rupiah (Rp), BI Rate menggunakan satuan persen (%), Dana Pihak Ketiga menggunakan satuan Rupiah (Rp), CAR menggunakan satuan persen (%)

Penelitian ini menggunakan analisis data regresi berganda dengan menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time series dengan cross section. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel makro dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan pertambangan. Pengolahan dan Analisa data dilakukan dengan program E-Views versi 9. Bentuk persamaan dari regresi berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Log}(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 \text{Log} X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Uji data panel yang meliputi uji Comman Effect, Fixed Effect, Random Effect. Setelah itu uji untuk pemillihan model terbaik yaitu dengan melakukan uji chow dan uji husman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini akan dijelaskan hasil analisis regresi data panel. Beberapa langkah dilakukan untuk mencari hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen melalui pengaruh variabel BI Rate, Dana Pihak Ketiga, CAR dan BOPO terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Pada tahun 2010-2017 dengan menggunakan 3 pendekatan Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect.

1. Hasil Regresi Panel

**Tabel 1. Hasil Regresi Panel**

Metode	Hasil Regresi
Common Effect	$-3.277376 - 0.285164X_1 + 1.208118X_2 - 0.088094X_3 + 0.038564X_4$
Fixed Effect	$4.261683 - 0.132942X_1 + 0.699177X_2 + 0.079873X_3 - 0.001043X_4$
Random Effect	$3.867436 - 0.131983X_1 + 0.726861X_2 + 0.079010X_3 - 0.001049X_4$

*Sumber : Eviews 9 Data Diolah, 2019*

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Likelihood Ratio Test (Uji Chow)

**Tabel 2. Hasil Pemilihan Model Dengan Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	255.910868	(4,151)	0.0000
Cross-section Chi-square	328.230418	4	0.0000

*Sumber : Eviews 9 Data Diolah, 2019*

Analiss ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan Indeks williamson. Rata-rata tingkat ketimpangan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan akan ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1. Rata-Rata Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2017**

Kabupaten/kota	Rata-rata
Kabupaten Lombok Barat	0.18
Kabupaten Lombok Tengah	0.26
Kabupaten Lombok Timur	0.31
Kabupaten Sumbawa	0.09
Kabupaten Dompu	0.08
Kabupaten Bima	0.15
Kabupaten Sumbawa Barat	0.57
Kabupaten Lombok Utara	0.10
Kota Mataram	0.04

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,(data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan menggunakan indeks williamson pada setiap daerah berbeda. Rata-rata Indeks williamson menunjukkan terdapat 1 daerah yang diklasifikasikan memiliki ketimpangan pendapatan tinggi yaitu daerah yang memiliki rata-rata indeks williamson > 0.5 yaitu Kabupaten Sumbawa Barat. Daerah dengan kalsifikasi

ketimpangan pendapatan rendah yaitu daerah dengan indek williamson  $< 0,3$  berjumlah 8 daerah antara lain Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai indikator dalam menentukan kondisi perekonomian pada Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, digunakan PDRB menurut harga konstan Untuk mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi. PDRB menurut harga konstan digunakan agar nilai yang diperoleh terbebas dari inflasi sehingga sifatnya riil.

**Tabel 2.**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Rata-Rata</b>
Kabupaten Lombok Barat	5,78	
Kabupaten Lombok Tengah	7,32	
Kabupaten Lombok Timur	5,52	
Kabupaten Sumbawa	6,37	
Kabupaten Bima	6,19	
Kabupaten Sumbawa Barat	6,06	
Kabupaten Lombok Utara	11,87	
Kota Mataram	4,78	

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tahun 2012-2017**

Berdasarkan Tabel 2 rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu 18,03 %. Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua yaitu sebesar 7,50%, sedangkan Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 4,5%

Investasi atau modal merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja melalui peningkatan faktor-faktor produksi yang ada. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah dapat meningkatkan kepercayaan serta minat investor dalam menanamkan investasinya. Investasi yang merupakan input dari produksi bersumber dari dalam maupun luar negeri.

**Tabel 3. Total Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2017 (\$ 000)**

Kabupaten/kota	Total
Kabupaten Lombok Barat	82.396,09
Kabupaten Lombok Tengah	49.570,12
Kabupaten Lombok Timur	42.221,65
Kabupaten Sumbawa	2.508.268,68
Kabupaten Dompu	4.919,81
Kabupaten Bima	9.511,89
Kabupaten Sumbawa Barat	32.289,04
<i>(dilanjutkan pada hal 8)</i>	
<i>(Lanjutan halaman 7)</i>	
Kabupaten Lombok Utara	77.700,26
Kota Mataram	143.772,07

*Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan total nilai investasi yang cukup tinggi antar daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu lima tahun. Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten dengan total investasi tertinggi sebesar \$ 2.508.268.680. kemudian di peringkat kedua adalah Kota Mataram sebesar \$ 141.772.070, dan Kabupaten Lombok Barat merupakan peringkat ke tiga sebesar \$ 82.396.090, sedangkan untuk daerah dengan penanaman modal asing terendah adalah Kabupaten Dompu yaitu sebesar \$ 4.919.810.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dianalisa menggunakan eviews. Dalam menentukan model yang tepat pada penelitian ini, dilakukan pengujian model. Pengujian model yang pertama menggunakan Uji Chow, pengujian ini digunakan untuk memilih antara model OLS (Common Effect Model) tanpa Dummy Variabel atau Fixed Effect Model. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui Probabilitas Cross-section Chi-square sebesar  $0,0000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau Fixed Effect Model merupakan model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan uji Hausman, pengujian ini digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model atau Random effect Model. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui Probabilitas Cross-section random sebesar  $0,0031 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau Fixed Effect Model merupakan model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian model maka analisis regresi data panel yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan Fixed Effect Model (FEM) diperoleh persamaan sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Data Regresi Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	0.217189	0.028718	7.562841	0.0000
X1?	0.151130	0.036255	4.168546	0.0001
LOG(X2?)	0.002994	0.002789	1.073616	0.2890
R-squared	0.952254	F-statistic		85.75927
Adjusted R-squared	0.941150	Prob(F-statistic)		0.000000

Berdasarkan Tabel 4. diperoleh model pada penelitian ini akan dijelaskan dengan rumus sebagai berikut :

$$IW_{it} = 0,217189 + 0,151130X_{lit} + 0,002994X_{2it}$$

Variabel (C) bernilai 0,217189, hal ini berarti ketika variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat bernilai konstan (tidak berubah), maka nilai indeks williamson sebesar 0,217189. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan koefisien regresi sebesar 0.151130 dengan probabilitas sebesar 0.0001 atau  $X1 \leq \alpha (0,05)$  dan thitung (4,168546) > ttabel (1,67528), sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti apabila variabel pertumbuhan ekonomi meningkat sebanyak 1 % pertahun, maka ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat akan meningkat sebanyak 0.151130 pertahun.

Variabel investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan koefisien regresi sebesar 0.002994 dengan probabilitas sebesar 0.2890 atau  $X2 \geq \alpha (0,05)$  dan thitung (1,073616) < ttabel (1,67528) sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.. Hal ini berarti apabila Variabel investasi meningkat sebanyak \$ 1.000 pertahun, maka ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat akan meningkat sebanyak 0.002994 pertahun, , meskipun peningkatan yang terjadi tidak besar atau tidak nyata (tidak signifikan). Secara simultan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitan f-statistic sebesar 0,0000 atau kurang dari  $\alpha (0,05)$  dan nilai fhitung = 85,75927 dengan ftabel = 2,83, atau fhitung > ftabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) atau goodness of fit sebesar 0,952254. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 95%, sedangkan sisanya 5% dijelaskan variabel lain diluar model yang tidak dibahas pada penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2016, diperoleh kesimpulan bahwa Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dalam persentase yang

didapat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun. Variabel ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Pengaruh yang dihasilkan sebesar 0,1511, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak sama pada beberapa daerah dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Investasi didapatkan dari Penanaman Modal Asing (PMA) di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu lima tahun. Variabel ini menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Williamson) sebesar 0,003, dengan taraf signifikansi lebih dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang timbul diakibatkan oleh meningkatnya penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan tidak besar atau signifikan.

Berdasarkan pada hasil yang diperoleh dan kesimpulan, saran yang dapat disampaikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempertimbangkan melakukan pemerataan pada pertumbuhan ekonomi demi mengurangi ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota. Selain itu diperlukan usaha untuk meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi pada daerah-daerah dengan nilai investasi yang rendah, agar terjadi pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan serta demi mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap potensi daerah sehingga dapat mencapai pemerataan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adipuryanti, N. L. Y., & Sudibia, I. K. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, XI(1), 20–28. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2014.11.036>

Aggina, D., & Artaningtyas, W. D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014. *Buletin Ekonomi*, 15, 1–154.

Arifin, Z. (2012). Analisis Perbandingan Perekonomian Pada Empat Koridor di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Humanity*, 5.

Boedirachminarni, A., & Suliswanto, M. S. W. (2017). PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN MALANG. *Jurnal Ekonomi Pembangunan UMM*, 15, 105–116.

BPS Nusa Tenggara Barat. (n.d.). Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat. Retrieved from <https://ntb.bps.go.id/>

Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun

2011-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539. Retrieved from nitatrihartini@gmail.com

Kuncoro, M. (2004). *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia (kedua)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kusuma, H. (2016). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9.

Nangarumba, M. (2015). *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014*. *Jesp*, 7(2), 9–26.

Nuraini, I. (2012). *Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Output Regional Kota Malang*, 5, 109–115.

Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. (2017). *Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali*. *E-Jurnal EP Unud*, 6(2), 255–285.

Saputra, N. C. (2016). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur*. Malang.

Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Sultan, & Sodik, J. (2010). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Periode (2000-2004)*. *Buletin Ekonomi*, 8(1), 1–70.

Susilowati, D., Sri, M., & Suliswanto, W. (2015). *MANUSIA, UTANG LUAR NEGERI DAN KEMISKINAN (KAJIAN TEORITIS DI INDONESIA)*, 89–106.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi (kesebelas)*. Jakarta: Erlangga.

Yuliani, T. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar kabupaten di Kalimantan Timur*. *JEJAK*, 8(*Journal of Economics and Policy*).

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1>.